

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Konsep Peran

Menurut Sarwono (2013), Teori peran (role theory) adalah teori yang “merupakansintesis dari banyak keyakinan, perspektif, dan bidang ilmiah. Teori peran dimulai dalam sosiologi dan antropologi dan saat ini digunakan di bidang-bidang tersebut selain psikologi. Istilah “peran” dipinjam dari industri teater dalam tiga cabang studi tersebut. Dalam teater, seorang aktor harus berperan sebagai karakter tertentu, dan dalam peran tersebut, ia diharapkan tampil dengan cara tertentu” (Wijaya et al., 2021).

Menurut Poerwadarminta (1995) adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa” Berdasarkan pendapat di atas peranan adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang atau seseorang yang berada dalam masyarakat. Ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang selama suatu acara. Jabatan dan peran saling terkait demi ilmu dan tidak dapat dipisahkan.” (Syarifuddin et al., 2022).

Suhardono (dalam MENJAGA, n.d.), “mengungkapkan bahwa peran dapat dijelaskan dengan beberapa cara yaitu: Pertama, sedikit penjelasan sejarah: ide tentang peran awalnya diambil dari kelompok yang erat kaitannya dengan drama dan teater, keduanya cukup populer di Yunani Kuno dan Roma. Dalam hal ini, istilah "peran" mengacu pada karakter yang dimainkan aktor di atas panggung

selama drama tertentu. Kedua, menurut definisi peran dalam ilmu sosial, peran adalah tugas yang dilakukan seseorang pada saat memegang tempat tertentu dalam organisasi sosial. Seseorang dapat menjalankan fungsinya dengan memegang jabatan tertentu karena jabatan yang dimilikinya.

Dari sekian banyak teori tentang peran, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah Sebesar atau kecilnya suatu pekerjaan, ia tetap harus bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, orang lain, dan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, tugas-tugas yang melekat pada identitas seseorang harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Perilaku positif dan buruk yang ditunjukkan seseorang saat menjalankan posisinya dapat dipengaruhi oleh peran yang diberikan kepadanya.

2.1.2 Pengertian Peran Pemerintah

Peranan pemerintah menurut Henry J. Abraham (dalam (Achmady, 2022)) dapat juga dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut:

1. Awalnya, tugas pemerintah adalah menjaga keamanan dan ketertiban dalam kemajuan baru. Dalam kenyataannya, tugas memungut pajak seringkali tidak terfokus pada kebutuhan masyarakat. Fungsi pemerintah yang paling konvensional adalah yang satu ini.
2. Gagasan negara pelayanan kemudian berkembang, menurutnya pemerintah melayani kebutuhan masyarakat dengan bertindak sebagai pelayan sosial. Hal ini juga didasarkan pada berbagai gagasan mengenai negara kesejahteraan.
3. Namun, ada juga metode untuk mewujudkan peran pemerintah yang menjadikan tugas pemerintah untuk mendorong pembangunan masyarakat

dan proyek reformasi. Untuk mendorong regenerasi dan pembangunan, pemerintah berperan sebagai “agen pembangunan”.

Menurut Sondang P. Siagian dalam bukunya *Administrasi Pembangunan* (2009: 132), peran pemerintah secara umum diwujudkan dalam berbagai cara, antara lain melalui pengaturan berbagai jenis tingkah laku, perumusan berbagai jenis kebijakan, penyediaan layanan, penegakan hukum, dan pemeliharaan keamanan publik.

Peran pemerintah penting dalam hal menciptakan keamanan dasar (basic security) hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial (Anam, 2021).

Peran pemerintah merupakan aktualisasi kedaulatan negara dalam mencapai tujuannya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar moral dalam hubungannya dengan lingkungan. Menurut Talidzu Ndraha, pandangan para ahli di atas dapat dijelaskan dengan mengatakan bahwa hubungan antara pemerintah dan yang diperintah adalah yang memungkinkan tercapainya tujuan yang dimaksud. Proses memenuhi tuntutan yang diperintah untuk tidak memprivatisasi pelayanan publik dan pelayanan publik merupakan fungsi pemerintah. layanan sipil untuk semua orang seperti yang diperlukan, menghasilkan hubungan transaksional berikut:

1. Masyarakat bisa memilih dari berbagai hal yang ditawarkan pemerintah, masing-masing dengan janji.

2. Setiap orang dalam masyarakat bebas memilih kebaikan yang menurut mereka paling sesuai dengan tujuan mereka. Layanan sipil melindungi dan menjamin kebebasan mereka.
3. Produsen/penjual (pemerintah) harus memegang teguh komitmennya jika konsumen telah memilih salah satu produk yang ditawarkan.
4. Pelanggan menggunakan kontrol sosial atas barang yang mereka terima untuk melihat apakah janji itu dipertahankan.
5. Jika janji dipenuhi, produsen (pemerintah) bertanggung jawab jika tidak, produsen harus memikul tanggung jawab.
6. Konsumen (masyarakat) akan lebih percaya terhadap klaim produsen jika produsen (pemerintah) bertindak secara bertanggung jawab (pemerintah).

2.1.3 Peran Pemerintah Dalam Pelayanan Publik

Institusi lain tidak dapat menggantikan peran pemerintah, atau dengan kata lain, birokrasi, yang memegang peranan sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Birokrasi ini sangat terkait dengan manajemen publik, pembangunan, dan organisasi dan manajemen pemerintah serta birokrasi itu sendiri.

Pemerintahan yang berada di bawah pengaruh kekuatan politik atau organisasi berskala besar akan berfungsi dengan baik. Namun, kekuasaan birokrasi dapat terjadi jika kekuatan politik dan organisasi massa tersebut tidak mampu melakukan tugas mengartikulasikan dan memajukan kepentingan masyarakat, apalagi jika tidak didukung oleh proses pengambilan keputusan (rule making) dan kontrol pelaksanaan keputusan yang bijak. memperoleh ukuran. Aparatur birokrasi akan dapat dengan bebas mempengaruhi lingkungan eksternalnya jika memiliki

kekuasaan yang lebih besar, yang akan meningkatkan posisinya dalam struktur organisasi pemerintahan negara.

Penyalahgunaan wewenang ini dapat menghalangi pemerintah untuk melaksanakan program yang telah diputuskan dan menawarkan layanan kepada masyarakat. Sistem birokrasi menyebabkan rasa tanggung jawab berkurang dalam keadaan seperti itu. Kurang rasa memiliki atas tugas yang diberikan. Hal ini ditengarai ketika birokrasi mulai kurang adaptif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Contoh-contoh ini sebagian besar merupakan hasil dari pandangan dunia pemerintah, yang belum mengalami perubahan mendasar. Aparatur negara masih memosisikan dirinya untuk dilayani, bukan untuk melayani, di lingkungan birokrasi, yang merupakan ciri khas dari paradigma lama. Namun, pemerintah seharusnya melayani bukan dilayani. Di era demokrasi dan desentralisasi saat ini, seharusnya seluruh aparatur birokrasi memahami bahwa pelayanan juga mengacu pada semangat pelayanan yang mengutamakan efektivitas dan keberhasilan bangsa dalam membangun, yang diwujudkan dalam perilaku melayani, tidak dilayani, mendorong, tidak menghalangi, memudahkan, tidak mempersulit, sederhana, tidak berbelit-belit, terbuka untuk semua orang, tidak segelintir orang.

2.2 Pelayanan Publik

Istilah pelayanan publik (public service) di Indonesia seringkali disamakan dengan pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Pelayanan publik adalah tindakan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk menyelenggarakan barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi

kepada seluruh warga negara dan penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana disebutkan dalam pelayanan publik terdapat empat unsur, yaitu: layanan; penerima layanan; (3) Jenis layanan; (4) Kebahagiaan klien.

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai baik dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka penegakan hukum, sebagai segala bentuk pelayanan, baik berupa barang publik maupun pelayanan publik, yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di pusat, daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Ramadhani, 2017).

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI 1998 memberi definisi bahwa pelayan publik adalah sebagai penyediaan produk dan/atau jasa kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa publik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dan dalam rangka BUMN/BUMD.

Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan (Setyobudi, 2013).

Dengan demikian dapat pula disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah usaha yang sengaja dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk menyediakan barang dan/atau jasa kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat karena hal itu diwajibkan oleh undang-undang dan merupakan hak dasar setiap warga negara.

2.2.1 Tujuan Pelayanan Publik

Tujuan pelayanan publik adalah memuaskan dan mungkin sejalan dengan tujuan layanan masyarakat atau umum. Untuk melakukan ini, sangat penting untuk menawarkan layanan berkualitas tinggi yang memenuhi persyaratan dan preferensi komunitas. Setidaknya mencakup komponen-komponen berikut, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

1. Kesedarhanaan, dalam arti proses atau proses pelayanan cepat, sederhana, mudah dipahami, dan mudah diimplementasikan.
2. Kejelasan yang mencakup: informasi tentang tarif atau iuran untuk layanan publik serta standar prosedur administrasi dan teknis.
3. Kepastian waktu, yaitu Pelaksanaan pelayanan publik harus selesai dalam waktu yang ditentukan.
4. Kemudahan akses, yaitu memastikan lokasi dan infrastruktur pendukungnya sesuai, terbuka untuk umum, dan mampu memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika
5. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, yakni Pelayanan yang disiplin, santun, ramah, dan tulus semua harus ditampilkan oleh anggota dinas.
6. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
7. Pelayanan berhasil dibangun apabila yang diberikan kepada masyarakat atau pelanggan mendapatkan pengakuan dari pihak-pihak yang dilayani.

Pengakuan ini bukan dari aparatur tetapi dari masyarakat atau pelanggan. Dengan adanya tata cara pelayanan yang jelas dan terbuka, maka masyarakat dalam pengurusan kepentingan dapat dengan mudah mengetahui prosedur ataupun tata cara pelayanan yang harus dilalui. Sehingga pelayanan itu sendiri akan dapat memuaskan masyarakat (Ramadhani, 2017).

2.2.2 Bentuk-Bentuk Pelayanan Publik

Pemerintah melalui lembaga dan segenap aparaturnya bertugas menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Moenir bentuk pelayanan ada tiga macam yaitu:

1. Pelayanan Dengan Lisan

Layanan lisan ini diberikan oleh karyawan di bidang hubungan masyarakat (Humas), layanan informasi, dan bidang lain yang bertanggung jawab untuk mencerahkan atau mendidik masyarakat umum tentang banyaknya pilihan layanan yang tersedia.

2. Pelayanan Dengan Tulisan

Layanan yang ditawarkan dapat berupa pemberian informasi tertulis kepada masyarakat yang menjelaskan peristiwa atau masalah dalam bentuk bahan tertulis.

3. Pelayanan Bentuk Perbuatan

Layanan dalam bentuk perbuatan adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar kesanggupan atau penjelasan secara lisan (NASUTION, 2021).

2.3 Stunting

Stunting merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang pengertiannya dimana kondisi tubuh pendek dan sangat pendek, melebihi kisaran yang seharusnya berada di bawah median panjang atau tinggi badan. Indeks antropometri tinggi badan, yang mencerminkan pertumbuhan linier sebelum dan sesudah melahirkan dan menunjukkan tanda-tanda malnutrisi jangka panjang akibat gizi buruk, juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi stunting. Nutrisi yang tidak memadai dan infeksi infeksi dapat menyebabkan stunting, yang merupakan pertumbuhan linier yang jauh dari potensi genetiknya. (ACC/SCN, 2003) Stunting adalah kondisi dimana balita (Bayi Balita) gagal tumbuh akibat kekurangan gizi yang terus-menerus, sehingga membuat mereka terlalu kecil untuk usianya (Ningsih, 2022).

Stunting tidak dimulai sampai bayi berusia 2 tahun, tetapi malnutrisi dimulai saat bayi masih dalam kandungan dan dalam beberapa minggu pertama setelah lahir. Balita yang bertubuh pendek dan sangat pendek adalah mereka yang tinggi atau panjang badannya di bawah rata-rata usianya. Stunting adalah masalah gizi yang signifikan dengan konsekuensi bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Orang yang kerdil memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi dari semua penyebab dan lebih banyak kejadian penyakit, menurut data yang luar biasa. Stunting akan mengganggu proses mental dan intelektual serta performa kerja fisik. (Mann dan Truswell, 2002).

2.3.1 Penyebab Stunting

Pada masa ini merupakan proses pengerdilan masa kanak-kanak dan kemungkinan menjadi lebih buruk dalam dua tahun pertama kehidupan.

Pertumbuhan dan perkembangan janin secara tidak langsung disebabkan oleh faktor makanan ibu sebelum dan selama kehamilan. Retardasi pertumbuhan intrauterin (IUGR), yang mengakibatkan malnutrisi dan penurunan pertumbuhan dan perkembangan pada bayi baru lahir, disebabkan oleh ibu yang kekurangan gizi. Karena keterbelakangan perkembangan mereka, penyakit virus berulang, peningkatan kebutuhan metabolisme, dan penurunan nafsu makan, anak-anak yang mengalami kondisi ini lebih mungkin kekurangan gizi. Dalam keadaan ini, menangani kelainan pertumbuhan yang pada akhirnya mengakibatkan stunting jauh lebih menantang (Yuliana et al., 2019).

Kurang gizi kronis (stunting) tidak hanya disebabkan oleh satu kondisi yang disebutkan di atas, tetapi juga oleh beberapa variabel yang saling terkait. Ada tiga faktor utama penyebab stunting: pola makan yang tidak seimbang (terkait dengan nutrisi dalam makanan, seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin); riwayat berat badan lahir rendah (BBLR); riwayat penyakit; dan teknik pengasuhan yang buruk, seperti ketidaktahuan ibu tentang kesehatan dan gizi sebelum, selama, dan setelah melahirkan. Pemberian ASI Eksklusif (ASI), tidak mengonsumsi Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).

2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting

Beberapa faktor terkait dengan kejadian stunting berhubungan dengan berbagai macam faktor karakteristik orangtua yaitu pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pola asuh, pola makan dan jumlah anggota dalam keluarga, faktor genetik, penyakit infeksi, kejadian BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), kekurangan

energi dan protein, sering mengalami penyakit kronis, praktek pemberian makanan yang tidak sesuai. Adapun faktor resiko stunting yaitu:

1. Pendidikan Orang Tua

Menurut George F. Kneller yang dikutip oleh Siswoyo, dkk (2007) pendidikan dapat dipandang dalam arti luas dan teknis. Dalam arti luas pendidikan menunjuk pada suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh yang berhubungan dengan pertumbuhan atau perkembangan atau perkembangan jiwa, watak, atau kemampuan fisik individu.

2. Pekerjaan Orang Tua

Pekerjaan yang dilakukan orang tua sangat mempengaruhi masalah gizi. Pendapatan keluarga yang mempengaruhi daya beli keluarga berkorelasi langsung dengan pekerjaan orang tua. Keluarga dengan sumber daya yang terbatas umumnya tidak dapat menyediakan makanan dengan kualitas dan kuantitas yang mereka butuhkan. Cara penyajian makanan dapat berubah akibat kenaikan pendapatan keluarga. Menghabiskan lebih banyak uang untuk makanan tidak serta merta menghasilkan lebih banyak jenis makanan yang dikonsumsi. Pertumbuhan dan perkembangan anak akan ditopang oleh pendapatan keluarga yang cukup karena orang tua dapat memenuhi semua kebutuhan anaknya, baik kebutuhan sesaat maupun jangka panjang. (Soetjiningsih,2000).

3. Dampak Stunting

Efek jangka pendek dan jangka panjang dari stunting mungkin terjadi. Stunting dapat mengakibatkan kegagalan tumbuh kembang, gangguan

pertumbuhan kognitif dan motorik, yang dapat berdampak pada perkembangan otak dan keberhasilan akademik, serta ukuran tubuh fisik yang tidak memadai dan masalah metabolisme dalam waktu dekat. Otak merupakan salah satu organ tubuh yang langsung terancam jika seseorang mengalami stunting yang merupakan gejala adanya gangguan pertumbuhan pada tubuh. Respons anak seperti melihat, mendengar, dan berpikir selama proses belajar dikendalikan oleh sel saraf di otak. Dampak jangka panjang dari stunting antara lain berkurangnya kapasitas intelektual, terganggunya struktur dan fungsi saraf dan sel otak secara permanen, serta berkurangnya kemampuan belajar pada usia sekolah, yang akan mempengaruhi produktivitas saat dewasa. Hal ini juga meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung koroner, dan stroke.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang sangat penting dan berguna bagi sebuah penelitian, berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penelitian ini bukanlah pertama, sebelumnya sudah terdapat penelitian-penelitian yang sejenis. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang dapat dihipun oleh peneliti:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Peneliti	Metode	Hasil Penelitian
1.	Sri Astuti, Ginna Megawati dan Samson CMS (2018).	Gerakan Pencegahan Stunting Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumendang.	cross sectional dan partisipasi masyarakat.	Hasil penelitian melalui pelatihan kader posyandu, didapatkan pengetahuan terbanyak cukup (40%). Hasil event HKN ke 54 tersosialisasi pencegahan stunting melalui berbagai media komunikasi, dan ditandatanganinya komitmen pencegahan stunting di wilayah kecamatan Jatinangor.
2.	Samsul Bahri (2021)	Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Stunting di	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Dinas Kesehatan dalam menekan laju penderita stunting telah mengalami penurunan di

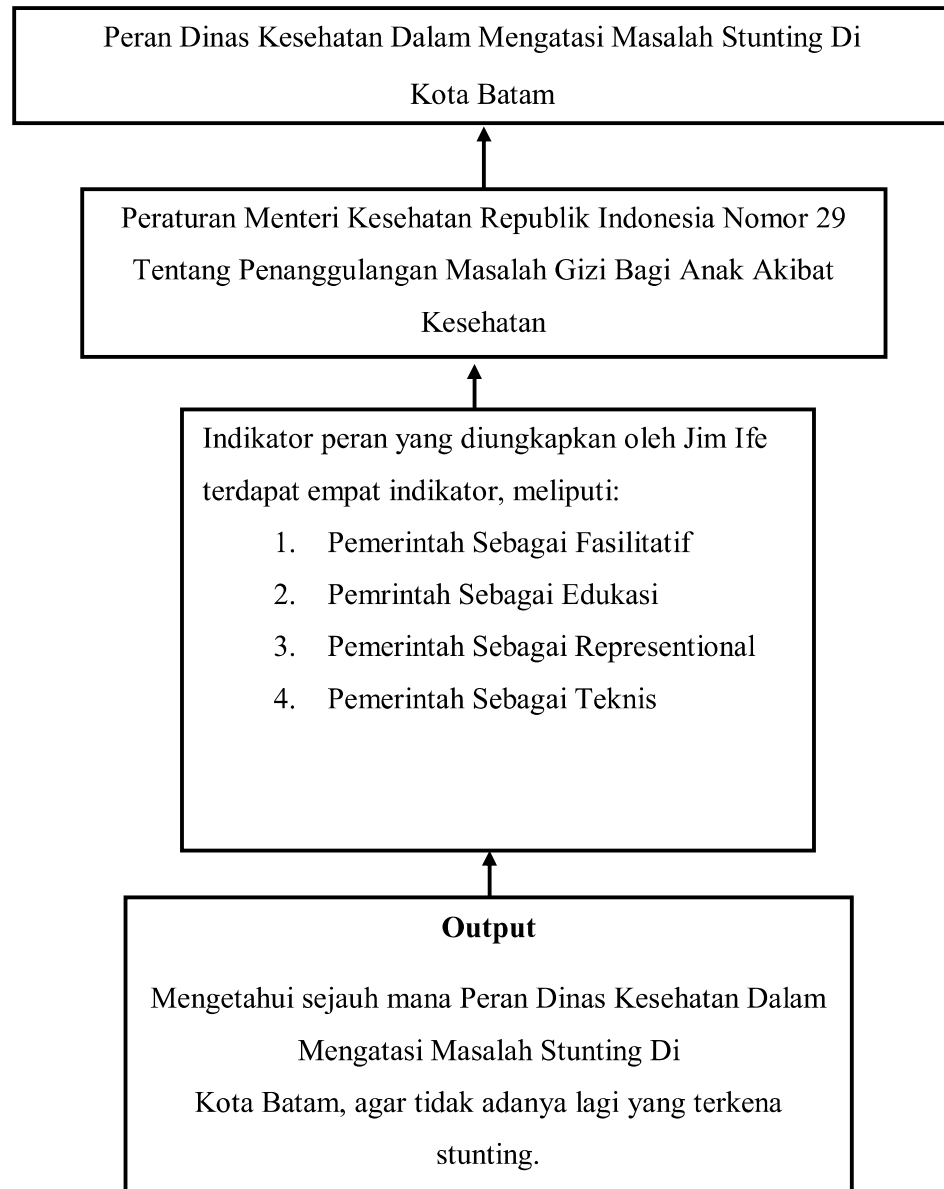
		Kabupaten Enrekang.		tahun 2019 di bandingkan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018 dengan harapan kedepannya akan menurun lagi dan dengan adanya Strategi Organisasi, Strategi program dan strategi pendukung sumber daya.
3.	Rini Archda Saputri (2019).	Hulu-Hilir Penanggulangan Stunting di Indonesia.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, di hulu (level kebijakan) telah banyak sekali kebijakan pemerintah yang dilahirkan sebagai upaya percepatan penanggulangan stunting, namun pada kenyataannya angka penurunan stunting masih jauh dari yang ditargetkan. Di hilir, masih terdapat banyak masyarakat maupun implementer program di level akar rumput yang belum memiliki penguasaan pengetahuan yang memadai terkait stunting itu sendiri, baik dampaknya, faktor

				penyebabnya, hingga cara penanggulangannya.
4.	Sukma Sahreni	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Stunting di Kelurahan Belian	Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pemantauan pertumbuhan, tingkat pengetahuan ibu, dan kehamilan di usia dini dengan kejadian stunting di Kelurahan Belian tahun 2021.
5.	Anisa Fanria Ningsih (2022)	Peran Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Stunting Di Desa Baturijal Hilir).	Kualitatif	Hasil penelitian diketahui Penanganan Stunting di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dengan adanya beberapa program yaitu Posyandu, Kelas Ibu Hamil, PTTD, dan PMT, adanya sosialisasi dalam bentuk penyuluhan yang dilakukan pada pertemuan-pertemuan seperti posyandu dan kumpulan ibuibu dengan dibantu oleh pihak Puskesmas dan kader-

				<p>kader desa. Hal itu dilakukan dengan harapan masyarakat akan sadar pentingnya kesehatan mengenai Penanganan Stunting agar terbebas dari stunting dimasa yang akan datang. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam Penanganan Stunting ini yaitu, kurangnya pemahaman orang tua terhadap pola asuh, pola makan, lingkungan yang bersih dan belum adanya tempat yang tetap untuk melakukan kegiatan posyandu.</p>
6.	<p>Qotrun Nada Sahroji, Rahmat Hidayat, Rudyk Nababan (2022)</p>	<p>Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Karawang.</p>	Kualitatif	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting di Kabupaten Karawang belum optimal, karena masih ada program yang belum dilaksanakan dan tidak berdampak langsung pada</p>

				masyarakat Kabupaten Karawang. Saran yang peneliti berikan untuk program penurunan stunting diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas Dinas Kesehatan dalam menangani stunting di Kabupaten Karawang yang sebelumnya baik menjadi sangat baik.
7.	Ririn Novianti, Hartuti Purnaweni, Ari Subowo (2021)	Peran Posyandu Untuk Menangani Stunting Di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peran tersebut dinilai belum maksimal karena kualitas sumber daya yang masih kurang, tingkat pendidikan kader, kemampuan penyampaian materi penyuluhan oleh kader yang belum memadai, penyampaian informasi yang belum menyeluruh dan belum dipahami secara utuh oleh Ibu balita.

2.3 Kerangka Berfikir



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran